

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu peran pemerintah dalam ekonomi nasional adalah mendirikan BUMN yang ditujukan menjadi *agent of development*, serta mengambil posisi untuk mencari keuntungan bagi negara. BUMN merupakan milik negara yang pembentukannya ditetapkan dengan undang-undang. BUMN juga termasuk organisasi hibrida karena diperbolehkan untuk mengelola dua jenis dana yang terdiri atas dana publik dari keuangan negara tersebut dan swasta. Dengan ciri dan bentuk seperti itu, BUMN harus memijakkan kaki pada dua sisi yang bisa dikatakan kontradiktif. Di satu sisi, BUMN harus menjalankan bisnis dengan mengikuti tata kelola yang baik (*governance*). Di sisi lain, BUMN juga harus dapat berperan sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan pada publik. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan. Selanjutnya, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi.

Transparansi dan efisiensi menjadi kata kunci perbaikan BUMN. BUMN harus didorong untuk lebih efisien dan punya misi yang jelas, terutama pada sektor-sektor yang memiliki eksternalitas tinggi. BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak harus diberi keleluasaan untuk mengembangkan diri. Kinerja

perusahaan negara saat ini sering mendapat sorotan kritis dari masyarakat. BUMN dipandang sebagai badan usaha yang kurang efisien dan cenderung menghabiskan anggaran pemerintah, rentan terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan memiliki profitabilitas yang rendah. Hal ini membuktikan bahwa kinerja BUMN belum optimal. (Ali Masykur Musa 2015). Kementerian BUMN saat ini sedang memproyeksikan laba bersih perusahaan pelat merah pada tahun ini mencapai Rp172 triliun. Angka ini lebih tinggi 14% dari prognosa 2015 sekitar Rp150triliun. Menurut Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno dalam jumpa pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (19/1). Ia menilai, kondisi perekonomian yang kurang baik pada 2015 telah menyebabkan pendapatan BUMN turun jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Pada 2015, pendapatan dibukukan sebesar Rp1.728 triliun turun 10,5% dari Rp1.932 triliun pada 2014. Adapun BUMN yang menopang pencapaian sepanjang tahun lalu adalah PT BRI Tbk, PT Telkom Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri Tbk, PT PLN (Persero), PT BNI Tbk, PT PGN Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Semen Indonesia Tbk, dan PT Jasa Raharja.<http://www.imq21.com/news/read/341099/20160119/183128/Laba-BUMN-2016-Dipatok-Rp172-Triliun.html>

Optimalisasi BUMN dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu peningkatan restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi. Privatisasi yang dimulai dengan restrukturisasi dan profitisasi masih diperlukan dalam rangka untuk mengurangi beban defisit anggaran negara dan sekaligus meningkatkan efisiensi

produksi BUMN.(Yumnas Widanmunti, 2010).Privatisasi yang dilakukan dengan metode penjualan saham di pasar modal melalui *Initial Public Offering (IPO)* menjadikan BUMN tersebut menjadi BUMN publik atau terbuka (BUMN Tbk), sebagai BUMN Tbk menjadikan struktur kepemilikannya memiliki berbagai kemungkinan komposisi struktur kepemilikan (Zulkifli,2010). D'souza, Nash, dan Magginson (2005) berpendapat bahwa perubahan mendasar akibat dari privatisasi adalah struktur kepemilikan.

Perkembangan kinerja empat BUMN yaitu PT Perusahaan Gas Negara, PT BNI, PT Wijaya Karya, dan PT Jasa Marga yang diprivatisasi pada 2006-2007. Jika sebelum privatisasi (2006) BNI bisa meraup laba Rp 1,93 triliun, setelah diprivatisasi (2007) turun menjadi Rp 0,90 triliun. Demikian juga dengan nilai devidennya yang menurun menjadi Rp 342 miliar dari Rp 954,37 triliun. Penurunan yang sama juga terjadi pada Jasa Marga, di mana laba yang diperoleh setelah privatisasi pada 2007 menjadi Rp 0,28 triliun dari Rp 0,46 triliun (2006). (esy/jpnn) <http://m.jpnn.com/news.php?id=14442n>. PT Garuda Indonesia tercatat mengalami kerugian sebesar Rp 185 miliar. Hal ini berbeda dari kondisi pada periode yang sama 2010, di mana Garuda memperoleh laba bersih sebesar Rp 123,06 miliar.

Pihak yang bertanggungjawab dalam menjalankan perusahaan adalah pihak manajemen atau direksi. Manajemen perusahaan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh mengelola perusahaan demi tercapainya kelangsungan hidup perusahaan dipandang sangat perlu mendapatkan apresiasi yang efektif dalam bentuk

kompensasi. Kompensasi diberikan kepada direksi sebagai imbalan terhadap waktu, tenaga, dan pikiran yang dicurahkan. Sistem kompensasi manajemen dibentuk sebagai alat untuk mencapai keselarasan tujuan antara manajemen agar giat bekerja, produktif meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai perusahaan. Selain kompensasi, ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi kinerja manajemen. Menurut Agnes Sawir dalam Amellia Atassya (2012:17), ukuran perusahaan adalah ukuran yang dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal.

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Salah satu rasio yang digunakan adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio utama dalam seluruh laporan keuangan, karena tujuan utama perusahaan adalah hasil akhir dari kebijakan dan keputusan yang diambil manajemen. Van Horne dan Wachowicz (2005:222) mengemukakan bahwa rasio profitabilitas terdiri atas 2 jenis yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya investasi.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang diketahui berpengaruh terhadap profitabilitas, berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu dilihat dari tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas

No	Peneliti	Struktur Kepemilikan	Privatisasi	Kompensasi Manajemen Eksekutif	Ukuran Perusahaan	<i>Debt Ratio</i>	<i>Total Asset Turn Over</i>
1	Zulkifli (2010)	√			√		
2	Yunmas Widamunti (2010)			√			
3	Andreani Caroline Barus (2013)				√	√	√
4	Komang Agung Surya Parimana (2014)		√	√	√		
5	Vita Aprilina (2013)		-				
6	Iswatin Khasanah (2015)			-	-		

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Struktur Kepemilikan Publik, Kompensasi Manajemen Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus terhadap perusahaan BUMN Periode 2010-2013)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana struktur kepemilikan publik pada perusahaan BUMN periode 2010-2013
2. Bagaimana kompensasi manajemen eksekutif pada perusahaan BUMN periode 2010-2013
3. Bagaimana ukuran perusahaan pada perusahaan BUMN periode 2010-2013
4. Bagaimana profitabilitas perusahaan BUMN periode 2010-2013
5. Seberapa besar pengaruh struktur kepemilikan publik terhadap profitabilitas perusahaan BUMN periode 2010-2013
6. Seberapa besar kompensasi manajemen eksekutif terhadap profitabilitas perusahaan BUMN periode 2010-2013
7. Seberapa besar ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan BUMN periode 2010-2013

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui struktur kepemilikan yang dilakukan oleh perusahaan BUMN periode 2010-2013

2. Untuk mengetahui kompensasi manajemen eksekutif yang dilakukan oleh perusahaan BUMN periode 2010-2013
3. Untuk mengetahui ukuran perusahaan perusahaan BUMN periode 2010-2013
4. Untuk mengetahui profitabilitas perusahaan BUMN periode 2010-2013.
5. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan publik perusahaan BUMN periode 2010-2013
6. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi manajemen eksekutif perusahaan BUMN periode 2010-2013
7. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan perusahaan BUMN periode 2010-2013

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini dapat mengembangkan minat dan keinginan untuk memahami tentang struktur kepemilikan publik dari perusahaan BUMN dan kompensasi manajemen eksekutif dan ukuran perusahaan serta mengetahui pengaruhnya terhadap profitabilitas perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perusahaan BUMN untuk meningkatkan profitabilitas dan memberikan kompensasi yang tepat sesuai dengan kinerja karyawan.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum dan referensi pengembangan keilmuan terutama yang berkaitan dengan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan ilmu ekonomi akuntansi yang berkaitan dengan struktur kepemilikan publik, kompensasi manajemen eksekutif dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Perusahaan BUMN yang melakukan privatisasi melalui IPO dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun waktu penelitian ini adalah terhitung sejak bulan Februari-Maret 2016.